



# PENTINGNYA UU KKG DI INDONESIA

**DIAN KARTIKASARI**

**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA**

# FAKTA-FAKTA DI INDONESIA

- ▶ Setengah Dari Penduduk Indonesia adalah Perempuan
- ▶ Kondisi objektif perempuan dalam tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia masih mencerminkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

# FAKTA-FAKTA DI INDONESIA

- ▶ Konstitusi Indonesia menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan namun masih banyak peraturan perundangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
- ▶ Indonesia sudah memiliki INPRES no 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan, namun hasil evaluasi pelaksanaan Inpres menunjukkan bahwa peraturan tersebut hanya mengikat lembaga eksekutif.

# FAKTA-FAKTA DI INDONESIA

- ▶ Negara mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dengan UU No. 7/1984
- ▶ Negara Terikat dengan komitmen global tentang Pembangunan Berkelanjutan (sustainable Development Goals-SDG), khususnya Goal 5
- ▶ Peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia, masih tertinggal di banding negara lain

# PENTINGNYA UU KKG

- ▶ Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- ▶ Mengikat semua lembaga negara di tingkat nasional maupun daerah .
- ▶ Mengikat semua warga negara Indonesia

# KOMITMEN MENERBITKAN UUKKG

- ▶ RUU KKG Masuk dalam Prolegnas tahun 2009-2014 dan Prolegnas 2015-2019.
- ▶ Pembahasan RUU KKG telah dilakukan sejak tahun 2011.
- ▶ Pada September 2014 DPR telah menyetujui RUU KKG untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang paripurna DPR namun masa bakti DPR habis pada Oktober 2014.

# KOMITMEN MENERBITKAN UUKKG

- ▶ DPR Periode 2014-2019 belum menjadikan RUU KKG sebagai Prioritas Pembahasan di tahun 2015, 2016 dan 2017.
- ▶ Masyarakat Sipil (JKP3) telah bekerja sama dengan KPPPA untuk menyusun Naskah Akademik dan RUU,
- ▶ Pembahasan RUU KKG di KPPPA tidak menunjukkan kemajuan signifikan sejak akhir 2015.

# Catatan Penting

- ▶ Adanya penolakan terhadap kehadiran RUU KKG dari elemen masyarakat anti demokrasi dan anti toleransi.
- ▶ Diperlukan strategi bersama, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mendorong Pemerintah dan DPR agar membahas RUU KKG.